

## SOAL GUGATAN SISTEM PEMILU

# MK Tepis Tuduhan Menunda Putusan

**JAKARTA (KR)** - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menepis tuduhan yang menyatakan bahwa majelis hakim MK menunda-nunda putusan perkara gugatan UU Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka. MK akan segera menyelesaikan permohonan uji materi UU Pemilu tersebut.

"Jadi, jangan dituduh juga nanti MK menunda segala macam, begitu," ujar Saldi Isra dalam Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, dipantau dari kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, Selasa (23/5).

Saldi juga menyatakan apabila terdapat pihak-pihak yang ingin menyampaikan keberatan, keterangan tambahan, atau hal lainnya dapat disampaikan bersama dengan kesimpulan yang akan diserahkan kepada majelis hakim MK. "Ini perlu penegasan-penegasan, terutama yang memungkinkan penambahan waktu," katanya.

Saldi menegaskan bahwa sidang perkara nomor 114/PUU-XX/2022 yang berlangsung pada hari ini merupakan sidang terakhir dan majelis hakim akan segera mengambil putusan. Agenda selanjutnya adalah

penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak kepada MK.

Majelis hakim telah menetapkan bahwa kesimpulan paling lambat diserahkan oleh pemohon dan para pihak terkait kepada MK pada hari Rabu (31/5). "Penyerahan kesimpulan itu paling lambat pada hari Rabu, tolong diperhatikan, tanggal 31 Mei 2023, pukul 11.00 WIB," kata Ketua MK Anwar Usman.

Sebelumnya, enam orang mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka ke tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022. Apabila gugatan tersebut dikabulkan MK, sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup, di mana para pemilih hanya disajikan logo partai

politik di surat suara, bukan nama kader partai.

Sementara I Gusti Putu Artha, saksi ahli yang dihadirkan oleh Partai NasDem dalam sidang perkara gugatan UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka meminta kepada majelis hakim MK untuk memutus sebelum 26 Juni 2023. "Dengan segala rasa hormat, sebagai mantan anggota KPU, mohon kepada majelis, kalau memang sidang ini bisa dipercepat, (tolong) diputuskan sebelum tanggal 26 (Juni, red)," katanya.

Putu memaparkan, pada tanggal 26 Juni 2023 hingga 9 Juli 2023, partai politik memiliki kesempatan untuk mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif. Apabila MK mengeluarkan putusan sebelum 26 Juni, partai politik yang ingin melakukan perbaikan berdasarkan hasil putusan MK dapat menyesuaikan diri dan mengirimkan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif kepada KPU. Dengan demikian, konflik politik yang terjadi akan berlangsung di masing-masing partai. (Ant/Has)-d

## AISYIYAH KELUARKAN PERNYATAAN SIKAP

# Mendesak KPU Revisi Pasal 8 PKPU

**YOGYA (KR)** - Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera merealisasikan janjinya kepada masyarakat merevisi ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2018. Revisi tersebut untuk mengembalikan kepada ketentuan yang sejalan dengan Pasal 245 UU 7/2017, yakni *Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.*

"Hingga saat ini, KPU belum merealisasikan revisi PKPU 10/2023 yang telah dijanjikan tersebut. Sikap ragu-ragu KPU menjadi penegas kurangnya komitmen lembaga ini dalam mewujudkan keterwakilan perempuan sebagaimana sebelumnya telah terjadi dalam proses seleksi penyelenggara pemilu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota," tandas Sekum PP Aisyiyah Dr Tri Hastuti saat membacakan pernyataan sikap di Kantor PP Aisyiyah di Jalan KHA Dahlan, Selasa (23/5). Pernyataan sikap yang bakal dikirim ke KPU, DKPP dan Bawaslu

itu mengingat pengaturan keterwakilan perempuan merupakan mandat konstitusi.

Menurut PP Aisyiyah, tim seleksi (timsel) banyak yang minus keterwakilan perempuan. Hal itu tak hanya terlihat antara lain di Tim Seleksi KPU Sumatera Utara dan KPU Jawa Barat, namun juga di KPU DIY. Padahal lanjut Tri Hastuti, di provinsi tersebut sama sekali tidak kekurangan figur perempuan potensial yang dapat mengisi komposisi timsel. Ironisnya lagi, hasil kerja Timsel KPU Provinsi/Kabupaten/Kota maupun keputusan KPU RI atas keterpilihan calon juga masih terdapat yang sama sekali tidak menyertakan keterwakilan perempuan.

Untuk itu, PP Aisyiyah mendesak diwujudkan dan dipenuhinya keterwakilan perempuan dalam komposisi timsel maupun keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta menyertakan kebijakan afirmasi yang tegas dalam Peraturan KPU tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar tidak menegasikan dan menihilkan keterwakilan perempuan dalam pengisian keang-

gotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

"Demikian halnya Bawaslu beserta jajarannya sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu harus mengimplementasikan *affirmative action* untuk terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30%," tambah Tri.

Dalam pernyataan itu Aisyiyah juga meminta KPU, Bawaslu dan DKPP harus menyusun kebijakan tata kelola organisasi penyelenggara pemilu yang berspektif adil dan setara gender dalam pengaturan, implementasi dan pengelolaan tahapan maupun organisasi pada setiap tingkatan.

Dalam poin keempat, Aisyiyah meminta KPU mendorong partai politik secara aktif membuka peluang seluas-luasnya kepada perempuan caleg di partai politiknya melalui kebijakan *affirmative action*.

"Partai politik juga harus berkomitmen meminimalisir pencalgan yang berbiaya tinggi (*high cost*) serta tidak menempatkan perempuan sekadar sebagai pelengkap pada posisi sepatu dan sebatas *vote getter* semata," katanya. (Fsy)-d

## KPU-BAWASLU HARUS SIAP DIGUGAT

# Mahfud Ungkap Potensi Kecurangan Pemilu

**JAKARTA (KR)** - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyinggung potensi kecurangan yang disebutnya akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, kecurangan memang terjadi dalam lima kali penyelenggaraan Pemilu terakhir.

"Karena sudah lima kali Pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus. Tetapi beda saudara yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah," kata Mahfud saat menjadi pembicara kunci seminar "Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga" di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (23/5).

Mahfud menegaskan hal itu jauh berbeda apabila dibandingkan semasa Orde Baru berkuasa, di mana sudah

menjadi rahasia umum bahwa Pemilu kerap kali sudah diatur siapa pemenangnya dan partai apa mendapat berapa banyak suara.

"Kalau dulu zaman Orde Baru itu ndak bisa dibantah, yang curang pemerintah terhadap rakyat. Pokoknya yang menang harus Golkar, pemilu besok yang Golkar dapat sekian, PPP sekian, PDI sekian, sudah diatur. Itu bukan berita bohong, memang iya," ujarnya.

Sementara dalam lima kali Pemilu terakhir, Mahfud menyebut kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan oleh peserta Pemilu. Dicontohkan modus kecurangan yang terjadi adalah peserta pemilu membari orang tertentu di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memalsukan hasil pemungutan suara yang diserahkan ke kelurahan, kecamatan dan seterusnya. "Sudah diakali sedemikian rupa, masih saja terjadi

kasus-kasus seperti itu," ucapnya.

Oleh karena itu, Pemerintah sejak 2003 secara resmi membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Lembaga yudikatif itu harus bekerja secara terbuka dan independen. "Karena kalau keputusannya tidak terbuka dan independen, itu bisa jadi masalah politik yang besar," tagasnya.

Mahfud bahkan mengaku sudah sempat berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk bersiap-siap menghadapi gugatan kecurangan pemilu. "Pemilu pasti diwarnai kecurangan, yang kemarin dan yang besok. Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Hasyim (Asy'ari, Ketua KPU RI, red.) dan Bawaslu ketika datang ke kantor saya untuk siap-siap digugat karena Pemilu curang," tuturnya. (Ant/Has)-f



## PEMBERITAHUAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah, dengan ini diinformasikan bahwa Bank BPD DIY akan merelokasi dan melakukan **Penggantian Nama Kantor Cabang Pembantu Syariah** serta **Pembukaan Kantor Kas Syariah** sebagai berikut:

### Pembukaan Kantor Kas Syariah UMY

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)  
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul  
Telp.(0274) 4342206

### Relokasi dan Penggantian Nama KCP Syariah

#### Nama dan Alamat Kantor Lama

Kantor Cabang Pembantu Syariah UMY

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)  
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul  
Telp.(0274) 4342206

#### Nama dan Alamat Kantor Baru

Kantor Cabang Pembantu Syariah Gamping

Jl. Wates Km. 5,5 Ambarketawang, Gamping, Sleman  
Telp. (0274) 2824984

Pelayanan pada Kantor baru dimulai pada :  
Kamis tanggal 25 Mei 2023



## DIDUGA SEMBUNYIKAN DITO MAHENDRA Bareskrim Panggil Artis Nindy Ayunda

**JAKARTA (KR)** - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap penyanyi Nindy Ayunda sebagai saksi dalam penyidikan dugaan perkara menyembunyikan tersangka kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra. Pemanggilan itu merupakan yang pertama bagi Nindy Ayunda untuk perkara dugaan menyembunyikan tersangka Dito Mahendra.

"Hari Jumat (26/5), kami panggil (Nindy Ayunda) sebagai saksi terkait menyembunyikan tersangka (Dito Mahendra)," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/5).

Djuhandhani menjelaskan, penyidik membuka penyelidikan baru dari perkara kepemilikan senjata api ilegal dengan tersangka Dito Mahendra dalam laporan polisi Nomor: LP/A/5/V/2023/SPKT.DIT-TIPIDUM/BARESKRIM POLRI tanggal 20 Mei 2023.

"Setelah geledeh kemarin (Jumat, 19/5), kami mendapatkan pidana baru, menyem-

bunyikan tersangka yang kemarin naik sidik," katanya.

Sebelumnya, Nindy juga dipanggil sebagai saksi terkait perkara kepemilikan senjata api ilegal. Namun, kekasih Dito Mahendra tersebut mangkir dari panggilan penyidik.

Berdasarkan hasil penggeledahan di dua rumah Dito Mahendra, penyidik memperoleh keterangan dari lima orang saksi yang diamankan. Dari penggeledahan itu diketahui bahwa Dito Mahendra dan Nindy Ayunda tinggal bersama di rumah di Jalan Intan RSPP.

Menurut para saksi, Nindy diketahui sehari-hari tinggal di rumah tersebut. Kemudian, pada tanggal 21 April, saat malam takbiran Lebaran 2023, Dito Mahendra datang ke rumah di Jalan Intan RSPP dengan menggunakan mobil Innova Putih. Dito tinggal di rumah itu sampai tanggal 23 April dan setelahnya keluar rumah bersama saksi berinisial AA. Informasi selanjutnya, tanggal 1 Mei, Dito kembali ke rumah tersebut dengan menggunakan mobil yang sama dan baru keluar tanggal 2 Mei. (Ant/Has)-d

## 7 HARI HILANG DI SAMUDERA HINDIA

# Pencarian 11 ABK Dihentikan

**CILACAP (KR)** - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap Sarjono mengatakan, upaya pencarian terhadap 11 anak buah kapal (ABK) yang hilang di Samudera Hindia akan dihentikan.

"Pencarian kayaknya dihentikan karena sudah tujuh hari, artinya tidak ditemukan dan masih dinyatakan hilang. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), upaya pencarian korban hilang dilakukan selama tujuh hari," katanya di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (23/5).

Selain itu, kata Sarjono, ABK dari kapal-kapal nelayan yang terlibat dalam pencarian 11 ABK Kapal Motor (KM) Serba Prima 8 yang terbakar di Samudera Hindia dekat Perairan Pulau Christmas, Australia, pun telah leleh.

Ia mengatakan, jumlah kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi kejadian dan turut melakukan pencarian berkisar 28-29 unit. Selama pencarian korban KM Serba Prima 8, lanjut Sarjono, ABK dari kapal-kapal nelayan tersebut tidak bekerja untuk menangkap ikan. "Mereka kan juga butuh untuk menghidupi keluarga yang di rumah. Dalam satu minggu enggak ada yang beroperasi, enggak ada yang bekerja, fokusnya untuk pencarian terhadap 11 ABK KM Serba Prima 8 saja," jelasnya.

Kendati demikian, Sarjono mengatakan, pihaknya telah memberikan imbauan melalui radio komunikasi agar kapal-kapal nelayan yang masih berada di sekitar lokasi kejadian tetap melakukan pemantauan sembari bekerja menangkap ikan.

Menurutnya, hal itu tetap dilakukan karena hingga saat ini 11 ABK KM Serba Prima 8 belum ditemukan dan masih dinyatakan hi-

lang meskipun upaya pencarian telah dihentikan.

Terkait hal itu, Sarjono atas nama HNSI menyampaikan permohonan maaf dan turut berduka kepada pihak keluarga dari 11 ABK yang hilang. "Mari kita berdoa bersama, barangkali ada keajaiban, mungkin ada kapal-kapal niaga seperti tanker yang menemukan para korban dan membawanya ke luar negeri. Kalau dinyatakan meninggal kan sudah ketemu jasadnya, kalau belum ditemukan berarti masih dinyatakan hilang," tegasnya.

KM Serba Prima 8 diketahui bertolak dari Dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC), Rabu (5/4) dengan membawa 14 ABK termasuk nakhoda untuk mencari ikan di Samudera Hindia. Tetapi saat berada pada posisi 8,27 derajat Lintang Selatan dan 105,19 derajat Bujur Timur atau dekat Pulau Christmas, Australia, pada Selasa (16/5), sekitar pukul 23.15 WIB, KM Serba Prima 8 terbakar dan seluruh ABK berupaya memadamkannya. Karena kobaran api membesar, seluruh ABK melompat ke laut dengan berpegangan pelampung parasut atau jangkar apung. Saat api mulai terlihat agak padam pada Rabu (17/5), sekitar pukul 04.00 WIB, dua orang ABK memisahkan diri dari rekan-rekannya untuk berenang mengejar KM Serba Prima 8 dan naik kapal, sedangkan ABK lainnya masih berpegangan parasut. Dua ABK bernama Nur Hasim (36) dan Hari Setiawan (38), keduanya warga Kabupaten Pemalang, berhasil diselamatkan KM Hasil Selu 2 pada Rabu (17/5) sekitar pukul 11.35 WIB, saat melintas di sekitar pangkai KM Serba Prima 8 dalam perjalanan balik ke Cilacap. (Ant/San/Mak)-d



KR-Antara/Okky Lukmansyah

**BIKSU MENUJU BOROBUDUR:** Sejumlah biksu berjalan kaki saat melaksanakan ritual Thudong di Jalur Pantura, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (23/5/2023). Sebanyak 32 biksu dari berbagai negara tersebut tiba di Kabupaten Brebes saat melaksanakan ritual Thudong dari Nakhon Si Thammarat, Thailand, menuju Candi Borobudur dalam rangka Hari Raya Waisak pada 4 Juni 2023 mendatang.